



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor:

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 10/PMK.05/2011 TENTANG
PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN
ANGGARAN LANJUTAN
PROGRAM/KEGIATAN NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI TAHUN ANGGARAN 2010
SEBAGAI ANGGARAN BELANJA
TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2011

Pada hari ini tanggal bulan tahun..... telah diselenggarakan rekonsiliasi realisasi anggaran antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja kode (.....), dengan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)..... kode (.....).

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama dengan melakukan proses pencocokan data realisasi Bantuan Langsung Masyarakat Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Tahun Anggaran 2010 dengan hasil sebagaimana terlampir yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini.

Laporan hasil rekonsiliasi ini menjadi dasar penyusunan dan pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Tahun Anggaran 2010.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dilaksanakan.

Kepala KPPN.....

KPA Satuan Kerja

NIP

NIP



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI SISA DANA PROGRAM/KEGIATAN NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANDIRI TAHUN ANGGARAN 2010
(DALAM RIBUAN RUPIAH)

Nomor SP : aaaa/bbb-cc.d/ee/fff (1)
Kode dan Nama Satker : (999999) XXXXXXXXXXXXXXXX (2)

No.	Kode	Uraian Kegiatan, Sub Kegiatan, Kel. Akun	BELANJA BANTUAN SOSIAL			Sumber Dana	Keterangan
			PAGU	REALISASI	SISA		
1	2	3	5	6	7	8	9
XX (3)	(4) XX.XX.XX.XXXX	YYYYYYYYYYYYYYYY (7)	999,999	999,999	999,999	XX (10)	
	(5) XXXX.XXXX	YYYYYYYYYYYYYYYY (8)	999,999	999,999	999,999		
	(6) XXXX	YYYYYYYYYYYYYYYY (9)	999,999	999,999	999,999		
JUMLAH			999,999	999,999	999,999		

KEPALA KPPN

..... 2011 (11)
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATUAN KERJA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (12)
NIP. YYYYYYYYYYYYYY (13)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (14)
NIP. YYYYYYYYYYYYYY (15)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

CARA PENGISIAN
LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI SISA DANA
PROGRAM/KEGIATAN NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI
TAHUN ANGGARAN 2010

Lampiran Berita Acara Rekonsiliasi Sisa Dana Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun Anggaran 2010 berisi informasi mengenai pagu, realisasi dan sisa dana kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Tahun Anggaran 2010 dengan cara pengisian sebagai berikut :

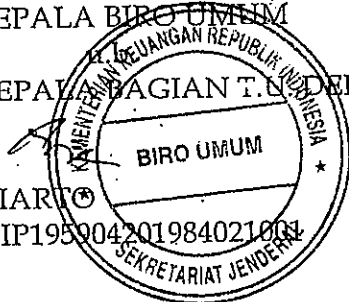
No.	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan Nomor SP DIPA
(2)	Diisi dengan Kode Satker dan uraian Satker
(3)	Diisi dengan Nomor Urut
(4)	Diisi dengan Kode Fungsi, Sub Fungsi, Program dan Kegiatan
(5)	Diisi dengan Kode Sub Kegiatan
(6)	Diisi dengan Kode BKPK / Kelompok Akun
(7)	Diisi dengan Uraian Kegiatan
(8)	Diisi dengan Uraian Sub Kegiatan
(9)	Diisi dengan Uraian
(10)	Diisi dengan Kode Sumber Dana
(11)	Diisi dengan Kota dan Tanggal
(12)	Diisi dengan Nama Kepala KPPN
(13)	Diisi dengan NIP Kepala KPPN
(14)	Diisi dengan Nama Pejabat Penanda Tangan (Kepala Satker/KPA)
(15)	Diisi dengan NIP Pejabat Penanda Tangan (Kepala Satker/KPA)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T. N. DEPARTEMEN

GIARTO

NIP195904201984021001



MENTERI KEUANGAN

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 10/PMK.05/2011 TENTANG
PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN DAFTAR
ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN
PROGRAM/KECIATAN NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI
TAHUN ANGGARAN 2010 SEBAGAI
ANGGARAN BELANJA TAMBAHAN TAHUN
ANGGARAN 2011

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN
TAHUN ANGGARAN 2011
NOMOR : aaaa/bbb-cc.d.eeff/2011 (1)
RINCIAN PENGELUARAN
(RIBUAN RUPIAH)

Kementerian Negara/Lembaga : (XX)
Unit Organisasi : (XX)
Provinsi : (XX)
Kode>Nama Sarker : (XXXXX)
Kewenangan : (XX)

Kode	Uraian Salter/Program/Kegiatan/Output/Sumber Dana	BELANJA					JUMLAH SELURUH	LOKASI/ KPPN	Cara Penarikan/ Register
		PEGAWAI	BARANG	MODAL	BANTUAN SOSIAL	LAIN-LAIN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
XXXXXX (7) XXX.XX.XX (9) XXXX (11) XXXX.XX (14) XX (16)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (8)	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999		
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (10)	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	XX.XX (13)	
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (12)	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	XXX (18)	XXXXXXXXXX (20)
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (15)	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999		
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (17)	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999		
				(21)					
				(22)					
	JUMLAH	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999	999.999.999.999		

XXXXXXXXXX, XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXX (23)
A.N. MENTERI..... (24)
..... (25)
..... (26)
NIP. (27)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

CARA PENGISIAN
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN
TAHUN ANGGARAN 2010

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Tahun Anggaran 2010 berisi informasi untuk masing-masing Satuan Kerja baik sasaran yang hendak dicapai maupun alokasi dana pada masing-masing jenis belanja dan akun dengan cara pengisian sebagai berikut:

No.	Uraian Isian
[1]	Diisi dengan Nomor SP DIPA
[2]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga
[3]	Diisi dengan kode Unit Organisasi dan uraian nama Unit Organisasi
[4]	Diisi dengan kode provinsi diikuti dengan uraian provinsi
[5]	Diisi dengan kode satker diikuti dengan uraian satker
[6]	Diisi dengan kode kewenangan dan uraian kewenangan
[7]	Diisi dengan kode satker
[8]	Diisi dengan uraian satker
[9]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit Organisasi dan program
[10]	Diisi dengan uraian program
[11]	Diisi dengan kode kegiatan
[12]	Diisi dengan uraian kegiatan
[13]	Diisi dengan xx pertama = kode provinsi, xx kedua = kode kabupaten/kota
[14]	Diisi dengan kode kegiatan dan kode output
[15]	Diisi dengan uraian output
[16]	Diisi dengan kode sumber dana
[17]	Diisi dengan uraian sumber dana
[18]	Diisi dengan kode kantor bayar (KPPN)
[19]	Diisi dengan cara penarikan (PL,RK,LC,PP)
[20]	Diisi dengan nomor register untuk PHLN
[21]	Diisi dengan pagu per jenis belanja (pegawai, barang, modal, bantuan sosial, dan lain-lain) dan jumlah seluruhnya dalam ribuan rupiah
[22]	Diisi dengan total pagu per jenis belanja (pegawai, barang, modal, bantuan sosial, dan lain-lain) dan jumlah seluruhnya dalam ribuan rupiah
[23]	Diisi dengan tempat dan tanggal penetapan DIPA
[24]	Diisi uraian kementerian
[25]	Diisi dengan jabatan penandatangan DIPA (PA/KPA)
[26]	Diisi dengan nama pejabat penandatangan DIPA
[27]	Diisi dengan NIP pejabat penandatangan DIPA

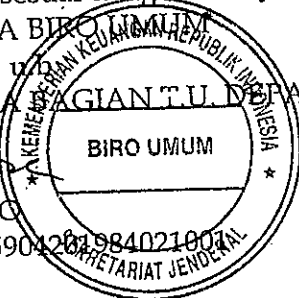
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

KEPALA AGIAN T.U. DEPARTEMEN

GIARTO

NIP195904281984021001



MENTERI KEUANGAN

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 10/PMK.05/2011 TENTANG
PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN
ANGGARAN LANJUTAN
PROGRAM/KEGIATAN NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI TAHUN ANGGARAN 2010
SEBAGAI ANGGARAN BELANJA
TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2011

KOP SURAT (1)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (2)

NIP : (3)

Jabatan : Kuasa PA Satuan Kerja (4)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi dengan KPPN (5), terdapat sisa dana Bantuan Langsung Masyarakat Program/Kegiatan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010 Nomor(6) Satuan Kerja (7) sebesar Rp.....(8);
2. Berdasarkan sisa dana tersebut pada angka 1 di atas, diajukan sebagai pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.(9);
3. Sisa dana sebesar Rp.....(10) tidak diajukan sebagai pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Tahun Anggaran 2010 karena(11).

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

.....(12),.....(13)

KPA Satuan Kerja..... (14)

(tanda tangan)

..... (15)

NIP. (16)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

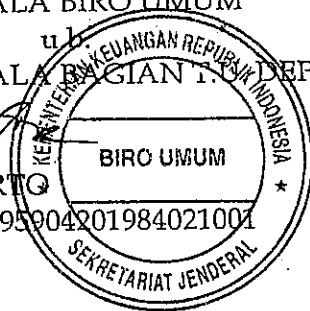
CARA PENGISIAN SURAT PERNYATAAN

No.	Uraian Isian
(1)	Sesuai kop surat Satuan Kerja yang bersangkutan
(2)	Diisi nama pejabat penandatanganan surat
(3)	Diisi NIP pejabat penandatanganan surat
(4)	Diisi nama Satuan Kerja yang bersangkutan
(5)	Diisi nama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pembayar
(6)	Diisi nomor Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2010
(7)	Diisi nama Satuan Kerja
(8)	Diisi nilai uang sisa dana (yang belum direalisasikan) berdasarkan rekonsiliasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(9)	Diisi nilai uang sisa dana yang akan diajukan sebagai pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Tahun Anggaran 2010
(10)	Diisi nilai uang sisa dana yang tidak diajukan sebagai pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Tahun Anggaran 2010 [(8) - (9)]
(11)	Diisi alasan tidak diajukan sebagai pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Tahun Anggaran 2010
(12)	Diisi lokasi/tempat penanda tanganan surat
(13)	Diisi tanggal bulan dan tahun penanda tanganan surat
(14)	Diisi nama Satuan Kerja
(15)	Diisi nama penanggung jawab surat
(16)	Diisi nama NIP penanggung jawab surat

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN TEKNIK DEPARTEMEN

GIARTO
NIP195904201984021001



MENTERI KEUANGAN

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



LAMPIRAN IV
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10/RM/05/2011 TENTANG
PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN DAFTAR
ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
LANJUTAN PROGRAM/KEGIATAN
NASIONAL PEMBERDAYAAN MASTARAKAT
MANDIRI TAHUN ANGGARAN 2010 SEBAGAI
ANGGARAN BELANJA TAMBAHAN TAHUN
ANGGARAN 2011

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : SATU SET DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN
TAHUN ANGGARAN 2011
NOMOR : aaaa/bbb-cc.d.eeff/2011 (1)

- A. Dasar :
- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 - UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 - UU No. 10 Tahun 2010 tentang APBN TA 2011 dan perubahannya

- B. Dengan ini disahkan Abkasi Anggaran :
- Kementerian Negara/ Lembaga : (XXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (2)
 - Unit Organisasi : (XX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (3)
 - Provinsi : (XX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (4)
 - Kode/Nama Satker : (XXXXXX) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (5)
- Sebesar : Rp. 999.999.999.999 (***XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX***) (6)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

XX XX (7)

XX.XX XX (8)

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

XXXXXX.XX XX (9)

XXXXX XX (10)

- C. Sumber Dana Berasal :
- Rupiah Murni
 - PNBP
 - PNBP Biasa
 - Penerimaan Saldo Awal BLU
 - Pinjaman/Hibah Luar Negeri
 - Pinjaman Luar Negeri
 - Hibah Luar Negeri
- 999.999.999.999 (12)
- 999.999.999.999 (13)
- 999.999.999.999 (14)
- 999.999.999.999 (15)
- 999.999.999.999 (16)
- 999.999.999.999 (17)
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri
- Pinjaman Dalam Negeri
- Hibah Dalam Negeri
5. Penerimaan Pembiayaan BLU
- Rp. 999.999.999.999 (11)
- Rp. 999.999.999.999 (18)
- Rp. 999.999.999.999 (19)
- Rp. 999.999.999.999 (20)

- D. Pencairan dana dilakukan melalui :
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (21)
 -
- E. Surat Pengesahan ini berlaku sebagai dasar pencairan/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. Tanggung jawab terhadap penetapan dan perhitungan biaya serta penggunaan dana yang tertuang dalam DIPA sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
- F. DIPA ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 30 April 2011.

XXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (24)
A.N. MENTERI KEUANGAN RI
KEPALA KANWIL DIJEN PBN PROVINSI XXXXXXXXXXXXXXXX (25)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (26)
NIP. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (27)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

CARA PENGISIAN SURAT PENGESAHAN
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN
TAHUN ANGGARAN 2010

Halaman ini berisi informasi mengenai hal-hal yang disahkan dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Tahun Anggaran 2010. Cara pengisian Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut:

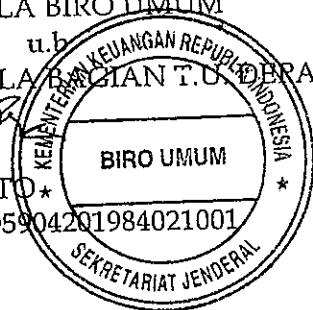
No.	Uraian Isian	
[1]	Diisi dengan nomor SP DIPA dengan ketentuan sebagai berikut:	
	aaaa	Nomor SP
	bbb-cc	kode Kementerian Negara/Lembaga - kode Unit Organisasi
	d	kode kewenangan (1=KP; 2=KD; 3=DK; 4 =TP; 5=UB; 6=DS)
	ee	Jenis DIPA (20= Lanjutan)
	ff	Diisi dengan kode pengesahan DIPA oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan (01 dst=Kanwil DJPBN).
[2]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga diikuti dengan uraian nama Kementerian Negara/Lembaga	
[3]	Diisi dengan kode Unit Organisasi diikuti dengan uraian Unit Organisasi	
[4]	Diisi dengan kode lokasi provinsi diikuti dengan uraian provinsi	
[5]	Diisi dengan kode satker diikuti dengan uraian nama satker	
[6]	Diisi dengan jumlah pagu keseluruhan DIPA dengan angka dan huruf	
[7]	Diisi dengan kode fungsi diikuti dengan uraian fungsi	
[8]	Diisi dengan kode sub fungsi diikuti dengan uraian sub fungsi	
[9]	Diisi dengan kode Kementerian Negara/Lembaga, Unit Organisasi dan program diikuti dengan uraian program	
[10]	Diisi dengan kode kegiatan diikuti dengan uraian kegiatan	
[11]	Diisi dengan jumlah pagu untuk program dan kegiatan	
[12]	Diisi dengan jumlah pagu Rupiah Murni (RM)	
[13]	Diisi dengan jumlah Total pagu PNBPN (Tidak perlu diisi)	
[14]	Diisi dengan jumlah pagu PNBPN (Tidak perlu diisi)	
[15]	Diisi dengan jumlah pagu Penerimaan yang berasal dari Saldo Awal BLU (Tidak perlu diisi)	
[16]	Diisi dengan jumlah pagu Pinjaman Luar Negeri	
[17]	Diisi dengan jumlah pagu Hibah Luar Negeri	
[18]	Diisi dengan jumlah pagu Pinjaman Dalam Negeri	
[19]	Diisi dengan jumlah pagu Hibah Dalam Negeri	
[20]	Diisi dengan jumlah pagu Penerimaan Pembiayaan BLU (Tidak perlu diisi)	
[21]	Diisi dengan nama KPPN	
[22]	Diisi dengan kode KPPN	
[23]	Diisi dengan jumlah uang untuk KPPN terkait.	
[24]	Diisi tempat dan tanggal penetapan Surat Pengesahan DIPA	
[25]	Diisi dengan nama Kanwil DJPBN	
[26]	Diisi dengan nama penandatangan SP DIPA	
[27]	Diisi dengan NIP penandatangan SP DIPA	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BUREAU KEUANGAN T. U. DEPARTEMEN

GIARTO *

NIP195904201984021001



MENTERI KEUANGAN

- ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PEMETAAN DAN KONVERSI STRUKTUR ANGGARAN
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN TAHUN ANGGARAN 2010
PROGRAM/KEGIATAN NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : (010) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
UNIT ORGANISASI : (010.05) DITJEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SEMULA (STRUKTUR ANGGARAN TA 2010)	
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ JENIS BELANJA
06.90.09 0847 00517 573119	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PNPM PERDESAAN DENGAN KECAMATAN BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT Belanja Lembaga Sosial Lainnya

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : (067) KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
UNIT ORGANISASI : (067.01) KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

SEMULA (STRUKTUR ANGGARAN TA 2010)	
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ JENIS BELANJA
06.90.04 6257 00517 573119	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TERTINGGAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN KHUSUS (P2DTK) BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT Belanja Lembaga Sosial Lainnya

MENJADI (STRUKTUR ANGGARAN TA 2011)		
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	KET.
010.05.13	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Program
1245	Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM)	Kegiatan
1245.03 014 573119	Cakupan PNPM Mandiri Perdesaan Pemberian Dana Bantuan Langsung Masyarakat Belanja Lembaga Sosial Lainnya	Output Komponen akun

MENJADI (STRUKTUR ANGGARAN TA 2011)		
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	KET.
067.01.06 3288	Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitas Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik	Program Kegiatan
3288.01	Fasilitasi penguatan kelembagaan pemerintah daerah dan mengalami peningkatan indeks good governance	Output
016 573119	Bantuan Langsung Masyarakat Daerah Tertinggal Belanja Lembaga Sosial Lainnya	Komponen akun



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA : (033) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
UNIT ORGANISASI : (033.05) DIJEN CIPTA KARYA

SEMULA (STRUKTUR ANGGARAN TA 2010)		MENJADI (STRUKTUR ANGGARAN TA 2011)		
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN/ JENIS BELANJA	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	KET.
06.02.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN	033.05.07	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Program
9303	PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI WILAYAH	2412	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman	Kegiatan
04928	PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR SOSIAL EKONOMI WILAYAH (RISE)	2412.08	Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi dan Sosial (RISE)	Output
573119	Belanja Lembaga Sosial Lainnya	011	Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Komponen
		573119	Belanja Lembaga Sosial Lainnya	akun
06.90.07	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA DAN SARANA PERDESAAN	033.05.07	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Program
4312	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN	2412	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman	Kegiatan
01032	BANTUAN SARANA DAN PRASARANA	2412.09	Infrastruktur Perdesaan (PPIP)	Output
573119	Belanja Lembaga Sosial Lainnya	011	Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Komponen
		573119	Belanja Lembaga Sosial Lainnya	Akun.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

06.02.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN	033.05.07	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Program
4280	PENANGGULANGAN KEMISKINAN PERKOTAAN (P2KP)	2413	Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara	Kegiatan
00081	BANTUAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN	2413.07	Keswadayaan Masyarakat	Output
573119	Belanja Lembaga Sosial Lainnya	011	Bantuan Langsung Masyarakat	Komponen
		573119	Belanja Lembaga Sosial Lainnya	Akun

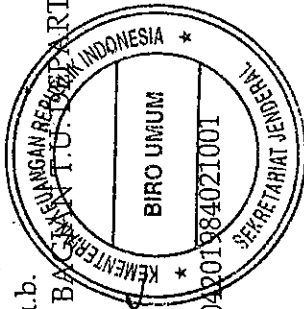
Catatan :

1. Indikator Kinerja Utama Program sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Program TA 2011;
2. Indikator Kinerja Kegiatan sesuai dengan Indikator Kinerja Kegiatan TA 2011;
3. Volume Output disesuaikan dengan banyaknya kuantitas Output yang dilanjutkan;
4. Untuk Sub Output dan Sub Komponen tidak harus ada (Opsional);
5. Detil belanja disesuaikan dengan detil belanja yang dilanjutkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAKSALAN T.U. DEPARTEMEN



GIARTO
NIP195904201984021001

MENTERI KEUANGAN

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO